



Mengapa Negara Republik Indonesia Butuh Politik Kiri?

Wahyu Trisno Aji^{1*}, Ahmad Arfandi Musida²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

E-mail: Wahyutrisnoaji@gmail.com¹, dandiabece@gmail.com²

*Korespondensi penulis: wahyutrisnoaji@gmail.com

Abstract. *Indonesia is a country that recognizes two major concepts and then they implement them, such as the Republic and Democracy systems. The two concepts are even stronger presented in the 1945 Constitution as the main part and at the same time a source of pride. However, Indonesia does not really practice the two concepts in reality because they have eliminated one important part of the general problem, namely the position of citizens and their rights in the country. The phenomenon of marginalizing left-wing politics is a tragedy in Indonesian history that makes the construction of the paradigm of Indonesian society consider that left-wing politics is too radical, anarchic and dangerous for Indonesia. so that the steps they take are to stay away from the world of left-wing politics which results in an imbalance between the government and citizens, a gap where the government together with the capitalists compete in progress and happiness, while ordinary people in Indonesia try and fight to stay alive. Left-wing politics is part of one way to apply the principles of Pancasila, especially the fourth and fifth principles. Left-wing politics basically offers a humanitarian struggle, so Indonesia needs that principle to revive national values in the form of real changes to better steps.*

Keywords: *Government, Indonesia, Left-wing Politics, Society.*

Abstrak. Indonesia adalah negara yang mengakui dua konsep besar dan kemudian mereka menerapkan, seperti sistem Republik dan Demokrasi. Semakin kuat lagi dua konsep dihadirkan di Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bagian utama sekaligus menjadi kebanggaan. Namun, Indonesia tidak benar-benar mempraktekkan dua konsep tersebut dalam realitas karena mereka sudah menghilangkan satu bagian penting dari persoalan umum, yakni tentang posisi warga negara serta hak-hak mereka di dalam negara. Fenomena penepian politik kiri adalah satu tragedi dalam sejarah Indonesia yang membuat konstruksi paradigma masyarakat Indonesia menganggap bahwa politik kiri terlalu radikal, anarkis dan berbahaya bagi Indonesia. sehingga langkah yang mereka lakukan adalah menjauhi dunia politik kiri yang akibat nya ketidakseimbangan antara pemerintah dan warga negara, kesenjangan dimana pemerintah bersama-sama kaum bermodal bersaing dalam kemajuan dan kebahagiaan, sedangkan masyarakat biasa di Indonesia berusaha dan berjuang untuk tetap bisa hidup. Politik kiri adalah bagian salah satu jalan mengaplikasikan sila-sila pancasila, secara khususnya adalah sila keempat dan kelima. Politik kiri pada dasar eksistensinya menawarkan perjuangan kemanusiaan, sehingga Indonesia butuh prinsip itu untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kebangsaan dalam wujud nyata perubahan ke langkah lebih baik.

Kata Kunci: Indonesia, Masyarakat, Pemerintah, Politik Kiri.

1. LATAR BELAKANG

Politik, Bukan lagi kata terdengar asing untuk semua orang, hari ini, kata dari politik sudah menjadi bagian sendi-sendi kehidupan manusia di muka bumi, termasuk manusia di Indonesia. politik sebagai seni dengan penuh cara memahaminya, bahkan menemukan satu makna lengkap dan sempurna dari politik di masa modern ini sangat lah sulit ditemukan, bahkan banyak orang-orang bertanya, politik itu lahir dari ibu pengetahuan seperti apa?, sehingga apa yang menjadi ruang bincang politik lebih menarik untuk dipertengkarkan daripada elemen lainnya?. Semua orang akan terus berbicara politik, ketika mereka masih menelan mentah-mentah julukan mereka sebagai makhluk sosial atau hewan politik (zoon

politicon). Sebutan ini pernah diucapkan oleh tokoh bernama Aristoteles (384-322 SM) bahwa manusia sebagai hewan yang hidup dalam ragam warna kebersamaan. Mereka menjadi spesies paling unggul dari spesies lainnya karena tumbuh dan berkembang dengan kemampuan kebersamaan, sekaligus apa yang dinyatakan sebagai kebersamaan ini melangkah dalam revolusi peradaban (Setiawan et al, 2023).

Politik, adalah satu dari sekian nampan yang telah dihasilkan manusia untuk berproses semakin panjang, menciptakan ruang kosmik dalam sosial manusia. Ruang dialektika politik adalah ruang dialektika penuh misteri, ambigu, dan bahkan paradoks. Sebab, ruang politik tumbuh dengan segala harapan dan kepentingan. Namun, pada akhirnya semua menginginkan apa yang disebut sebagai “kepentingan” menjadi utama, salah satu langkah mewujudkan mimpi itu tak lain dari memperoleh kekuasaan. Tidak ada definisi yang lebih indah dari kekuasaan selain apa yang telah diungkapkan oleh Bertrand Russell (1872-1970) bahwasanya kekuasaan dipahami sebagai cara dari manusia untuk memperoleh mimpi atau tujuan (Ramadhani et al, 2023). Kekuasaan menjadi titik kunci penting untuk seseorang untuk membuka kotak pandora yang berisikan “harapan” dengan warna-warni wujudnya, mencapai sebuah tujuan. Kekuasaan selalu menjadi Tuhan bagi manusia yang seringkali disembah di setiap sudut tempat, baik di rumah, sekolah, tempat ibadah, dan bahkan di rumah sakit sekalipun. Tidak sedikitpun seseorang lepas dari “kekuasaan” yang menjadi cermin dari politik (Aji, 2024).

Makna politik dari setiap dimensi akan berbeda-beda, jika pertama pertanyaan muncul ialah politik itu apa?, jawabannya akan berbeda-beda ketika siapa yang ditanya. Jika masyarakat secara umum ditanya tentang politik, maka jawaban mereka akan cenderung melepaskan diri dari kata “pemerintah” dan nuansa kata-kata kotor seperti “licik, lelak, pembohong, pendusta, dlsb” dengan kata-kata yang dimaknai sebagai wujud negatif (Syarofuzzaman, 2024). Namun, jika porsi politik di pertanyakan kepada orang-orang yang memang paham politik. maka mereka akan bergelut pada pemahaman mendalam mengenai politik secara sebuah seni, politik sebagai sebuah mimpi, politik sebagai sebuah cara, dan tentu politik adalah tentang kekuasaan.

Ini bukan berarti ada demarkasi yang menjelaskan makna politik dari setiap subjek berdasarkan “tahu” semata, namun ini tentang pengalaman-pengalaman, pemahaman, pendalaman, dan bahkan refleksi tentang jati diri politik seperti apa yang dimaksud. Politik menuju ruang perdebatan panjang sejak manusia mulai mengenal kekuasaan sebagai nilai pragmatis (Parlan & Bahar, 2024), artinya, manusia sejak awal telah memahami tentang arti politik, namun bentuk dalam segi kesadaran mereka masih dalam cangkupan rendah.

Kekuasaan dan politik adalah jalan panjang dari kisah-kisah versi manusia yang ingin hidup dengan estetika dan etika sosial. Hidup dengan memperoleh sesuatu hal dengan kekuasaan yang memudahkan mengakses semua, sekaligus juga pertimbangan etis dan moralitas pada setiap keputusan tentu akan menjadi proses dialektik memaknai sebuah politik.

Jika politik telah lahir sejak manusia mulai bertengkar dan dilema tentang sebuah keuntungan, mendambakan apa yang ingin dicapai dengan lebih cepat, kemudian ada yang menganggap nya juga sebagai sebuah pemberian dari Tuhan, sehingga apa yang dikatakan sebagai kekuasaan menjadi ladang bisnis keinginan. Kekuasaan selalu menjadi keinginan setiap orang untuk dicapai, karena dasar mempengaruhi orang lain dan memiliki ruang akses adalah keuntungan-keuntungan dari kekuasaan. Politik tentu adalah bagian satu padu dari kekuasaan, sebab dimana ada politik, disitulah ada kekuasaan bermunculan. Pola dari kekuasaan dalam politik adalah sama, ada yang dikuasai dan ada yang menguasai, jika mengikuti kata dari Michel Foucault (1926-1984) yakni filsuf inggris menerangkan satu ide general tentang kekuasaan sebagai konsep “relasi kuasa”. Dalam makna sederhana, relasi kuasa merupakan konsep dimana ada kekuasaan dalam sekitar manusia, manusia tidak akan lepas dari kekuasaan yang berpola pada ada yang menjadi penguasa dan ada yang dikuasai, baik dalam rumah, keluarga, masyarakat, hubungan pasangan, negara, sampai dengan agama. Selalu ada relasi kuasa hadir didalam nya, sehingga kekuasaan haruslah diartikulasikan sebagai bentuk pengaruh dan saling mempengaruhi untuk mencapai sesuatu hal, sehingga politik lah menjadi alat atau seni mencapai kekuasaan tersebut (Aji, 2024).

Kemudian menjadi pertanyaan dan sekaligus menjadi kajian mendalam dalam tulisan ini, bagaimana dengan politik di Indonesia, bagaimana dengan makna politik dan kekuasaan di Indonesia, dan seperti apa politik di Indonesia?. Jawabannya politik di Indonesia seperti politik bumi yang berawan namun tak pernah menurunkan hujan sama sekali. Politik Indonesia hari ini, penuh dengan gejolak, warna gelap, kerapuhan, kekhawatiran, kesombongan, kerakusan, dan bahkan perilaku politik non etis pun menjadi jawaban jika ditanyakan bagaimana politik di Indonesia hari ini.

Ini bukan mengada-ngada, atau bahkan merendahkan bangsa Indonesia. namun, pada kenyataannya Indonesia hari ini masih gelap gulita dengan isi awan gelap yang menutupi permukaan bumi. Awan-awan ini diisi oleh banyak para orang-orang penjahat publik yang menutup bumi Indonesia dengan keserakahan mereka. Indonesia dalam darurat banyak hal, namun tetap saja. Indonesia adalah negara yang penuh dengan usaha untuk membangun diri mereka menjadi bangsa yang besar, optimis, berperadaban di tengah-tengah sekat yang mereka sendiri tahu itu adalah halangan terbesar mereka. Artinya, kepercayaan dari manusia Indonesia

hari ini adalah bentuk kepedean politik yang menghadapi pemerintahan yang korup, kebijakan yang tidak berkualitas, sampai masyarakat yang dikenal dengan sumber daya yang rendah. Semua itu menutupi bumi Indonesia sebagai bagian awan sehingga Indonesia hari ini masih dalam gelap-gulita tertutup oleh awan politik yang masih tidak ingin menurunkan hujannya.

Apa yang salah dengan politik di Indonesia?,

Tentu jawabannya ialah politik di Indonesia hari ini terlalu percaya diri, namun mereka tidak pernah melihat kondisi dan situasi real yang di hadapan mereka. Seperti bagaimana pemerintah Indonesia masih saja mengedepankan prinsip kolonialisme yang telah ditinggalkan oleh penjajah, baik itu muncul dari pendidikan, kehidupan bermasyarakat, dunia kerja sampai-sampai kehidupan berbangsa dan bernegara, padahal saja dikatakan negara merdeka. Tentu ini akan menjadi tanda-tanya besar. Mengapa Indonesia masih dalam keadaan seperti ini, politik di Indonesia benar-benar mengedepankan nilai yang disebut sebagai “Republik”, artinya apa yang menjadi urusan publik lah yang menjadi urusan utama negara, kemudian semakin di perkuat lagi dengan muncul sistem bernama “demokrasi” sekaligus mengatakan bahwa Indonesia adalah negara berkesatuan dengan mengusahakan sesuatu mimpi kebangsaan dari, oleh dan untuk rakyat.

Namun Republik dan Demokrasi tidak cukup untuk menyehatkan Indonesia yang sakit. Sebab, keduanya hanyalah sebatas konsep yang hadir dalam tekstual dan formalitas (Agustín, 2020). Namun, saat realitas di paparkan, semua tertampar karena di perlihatkan bahwa Indonesia tidak benar-benar menerapkan apa yang dimaknai dengan Republik dan Demokrasi itu. semua yang terjadi di Indonesia hari ini adalah persoalan kepentingan elit, kemajuan oligarkis, keinginan penguasa dan pengusaha. Namun, jika ditanyakan bagaimana nasib masyarakat biasa?, tentu jawabannya mereka akan selalu menjadi rakyat-rakyat biasa saja, hanya menyembah kepada pemerintah dan kaum kapitalis oligarki yang menguasai negara. Kekuasaan politik di Indonesia tidak pantas untuk dikatakan stabil, sebab banyak konflik-konflik yang terjadi tentang persoalan masalah publik berasal dari ketidakadilan dari penguasa yang memegang kekuasaan. Apa yang dikatakan kekuasaan dalam politik yang menjadi seni misteri itu tentu nyata, sehingga hari ini, tidak ada yang bisa menebak nasib bangsa Indonesia akan dibawa kemana dengan situasi dan kondisi yang begitu mencemaskan tersebut (Aji, 2024).

Tentu, bukan kata “kepasrahan” pertama kali diucapkan oleh warga negara Indonesia, jika mereka benar-benar mendirikan diri mereka nasionalisme, maka yang dihidupkan oleh mereka adalah hidup dalam kebersamaan, merangkul, bersatu dalam kesatuan tanah, air, dan berdarah satu bangsa Indonesia. Apa yang hari ini terjadi di negeri ini tentu merupakan buah

dinamika politik yang sulit sekali untuk ditebak arah dan seperti apa yang akan terjadi nantinya. Namun satu hal yang pasti adalah, Indonesia masih ditutupi awan kegelisahan dan kekhawatiran eksistensi, sehingga langkah untuk mengusir awan gelap tersebut atau bahkan menurunkan hujan adalah dengan cara “melawan”. Salah satu dari sekian banyak cara melawan adalah menghidupkan lagi politik kiri di Indonesia yang sudah lama tenggelam di samudera karena ulah sejarah yang menenggelamkannya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik, dimana dalam penelitian kualitatif menekankan pada analisis untuk memperoleh hasil data deskriptif berupa kata-kata tertulis, kemudian di lakukan analisis data secara mendalam. Penelitian ini berfokus pada data studi kepustakaan sehingga peneliti tidak melakukan penelitian ke lapangan, melainkan fokus pada studi literatur yang di peroleh dari buku, jurnal, website dan lain sebagainya. Adapun teknik analisis yang di gunakan diantaranya pengumpulan data, penyajian data dan verifikasi kesimpulan (Zuchri abdussamad, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengapa Politik Kiri Dibenci Di Indonesia

Sejarah Indonesia dicatat dengan banyak versi dan banyak konspirasi. Ini bukan tanpa argumentasi, sebab banyak hal yang membuat sejarah tercatat rapi di Indonesia mulai rapuh dengan keraguan, sebab banyak hal yang dikritisi penuh dengan konspirasi. Bukan menemukan hasil kepuasan dan yang baru, bahkan pengkritik sejarah menemukan ironi bahwa banyak catatan-catatan sejarah tidak sesuai dengan fakta. Sejarah di Indonesia selalu ada dalam kondisi-kondisi yang berlebihan, tidak pernah tuntas dalam menyampaikan fakta, itulah yang membuat lahirnya versi-versi sejarah yang membanjiri pengetahuan manusia di Indonesia (Aji, 2024).

Kita menjawab, ada dimensi sejarah kelam bangsa Indonesia mengapa Indonesia yang dikatakan sebagai negara demokrasi membenci politik kiri, jawabannya akan kembali pada bagaimana sejarah mencatat bahwasanya dunia politik kiri dipersonifikasikan sebagai “iblis” pembunuh. Negara Indonesia memberikan pandangan bahwa Politik kiri memberikan trauma kepada bangsa ini, ia telah membunuh kepercayaan dan integrasi kebangsaan dengan keserakah.

Dulu, ada satu hal yang menarik sebelum politik kiri dijauhi seperti kondisi hari ini. Para pejuang bangsa di Indonesia pada masa penjajahan menghidupkan ide-ide besar dari gagasan-gagasan politik kiri, karena dalam politik kiri, mereka bisa sebebasnya menyatakan penjajahan atau kolonialisme sebagai seorang penindas, perlawanan atas penjajahan, perjuangan kelas, melawan kapitalis, menghancurkan alienasi dan membangun ekonomi yang berbasis kepada rakyat (Costello et al, 2023). Banyak variabel-variabel yang menjelaskan bahwa politik kiri berposisi kepada rakyat dengan dalil perjuangannya. Sebut saja salah satu diantaranya adalah HOS Tjokroaminoto (1882-1934) dengan kekuatan politik Islam sosialis yang mengharuskan Indonesia bisa bangkit dengan saling menggandeng tangan bersama, baginya Indonesia harus bisa berjuang dan merdeka seperti bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW memperjuangkan kemerdekaan bangsa Arab dan seluruh manusia dengan ajaran yang dibawa, hingga hari ini terbukti, apa yang diajarkan Nabi masih relevan untuk sebuah pemaknaan “perjuangan”. Itulah dunia yang perlu di contoh oleh Indonesia, bercermin pada kebersamaan dan kesejahteraan seperti halnya perjuangan yang dilakukan Nabi. Jawaban yang sama miripnya dilontarkan oleh para tokoh-tokoh perjuangan bangsa seperti Soekarno dan Tan Malaka menghidupkan Indonesia dengan sebuah perjuangan melawan para penjajahan, mereka dengan basis yang sama mengusahakan sebuah kemerdekaan. Kemerdekaan yang tidak lagi terjajah, tidak lagi terhina oleh bangsa lain dan tidak lagi tenggelam dalam lautan penderitaan (Aji, 2024).

Para tokoh-tokoh pejuang bangsa Indonesia pada masa lalu menghidupkan politik kiri sebagai basis perjuangan, sehingga bangsa Indonesia tumbuh berkembang menjadi bangsa yang siap dengan berbagai tantangan. Tidak ada yang peduli seperti apa tantangan di depan mata dari sebuah bangsa, ketika mereka telah menguji sendiri ketangguhan dari negaranya, maka apa yang dihadapi sebagai sebuah masalah akan lebih cepat diselesaikan. Konsepsi politik kiri membangun kehidupan bangsa Indonesia sebagai lawan dari “kemahalan” politik dihargai dengan kapitalis modal, sehingga politik kiri menjelaskan politik dari kemenangan dan pembangunan bangsa bukan persoalan nilai modal dan kapitalisme kepentingan. Namun, tentang persoalan bagaimana bangsa tumbuh dengan akar yang kuat, melalui dialektika dilakukan oleh warga negara untuk bersama-sama membangun bangsa dengan kepentingan bersama.

Namun, politik kiri pada sejarah tidak seindah apa yang diceritakan pada perjuangannya, selalu ada sikap angkuh pada siapapun. Karakteristik machiavellianisme bermunculan ketika “politik dimaknai dengan kepentingan buta”, akibatnya adalah muncul sikap fatal yang berkonsekuensi pada kerugian, meskipun pada dasar argumentasi demi sebuah

kebangsaan yang merdeka. Sejarah Indonesia dalam politik kiri pada masa lampau tentu dicatat dengan tinta merah, bahwa politik kiri seperti ideologi komunisme-stalinisme adalah politik yang membahayakan. Sejarah mencatat peristiwa 1948 (pemberontakan madiun 1948) dan puncaknya peristiwa 1965 (GS30PKI) adalah bentuk nyata bahaya politik dengan ideologi komunisme-stalinisme, tetapi kesalahan fatal yang muncul adalah semua pemahaman tersebut dilarang untuk dipelajari sejak peristiwa tersebut terjadi. Karena anggapnya, itu adalah trauma bangsa Indonesia menganut sistem yang terlalu materialis. Para kaum kepentingan buta itu mengatakan, politik kiri haruslah dibuang jauh-jauh dari Indonesia, karena mereka yang selalu berkata “tidak” pada setiap perdebatan dan perumusan bangsa Indonesia (Aji, 2024).

Pandangan buruk pada politik kiri pada peristiwa-peristiwa tersebut dijadikan sebagai hal yang harus diberlakukan. Sehingga apa?, setelah pemerintah pada negara yang mengagungkan demokrasi ternyata membuang keterbukaan dengan ketidaksadaran. Mereka tidak lagi memposisikan politik kiri hadir, karena itu terlalu membahayakan bagi negara. Sehingga, akibatnya hingga hari ini, tidak ada para politisi yang benar-benar lahir sebagai orang-orang yang memperdebatkan negara. Jika dulu para pejuang bangsa dalam garis politik kiri memposisikan diri mereka sebagai orang-orang rakyat kecil, sekarang semua itu hanya berlaku ketika pada momentum-momentum saja. Kata “rakyat-rakyat kecil” hanya akan lahir ketika masuk dunia pemilu saja, sisanya adalah negara dan pemerintah tidak peduli (Costello et al, 2023).

Trauma sejarah pada politik kiri dilakukan oleh beberapa orang yang menyalahpahami berakibat panjang. Indonesia menjadi negara yang hanya menurut tanpa meragu dalam kehidupan berbangsa, itu tentu bukan sesuatu kondisi yang bisa dikatakan baik, sebab ketika politik kiri sudah tidak ada karena dibuat-buat rasa trauma terkontrol oleh negara yang pernah merasakan bengis politik kiri, maka membuat kesimpulan bahwa politik kiri haruslah dibuang sejauh mungkin dari negara Indonesia ini, masyarakat pun ikut saja apa yang disabdakan oleh negara dengan para kaum-kaum berkepentingan elit, berusaha untuk membuang politik kiri yang cenderung memposisikan prinsip politik mereka selalu pada pembangunan atas nama rakyat.

Era orde baru, muncul tepatnya ketika setelah terjadi peristiwa GS30/PKI, penumpasan tragedi tersebut menjadi ajang baru warna politik di Indonesia, masyarakat melihat bahwa perbuatan dari para politik kiri yang di sandarkan kepada partai komunis Indonesia (PKI) dan ideologi komunis, bahkan sosialis mulai dipertanyakan, bahkan secara langsung tanpa mikir panjang, PKI dan ideologi komunisme ditolak dan dilarang hadir di Indonesia. Masa awal orde baru inilah, politik kiri menjadi sepi peminat, karena apapun yang berkaitan dengan politik kiri,

selalu lebih banyak dikaitkan dengan tragedi G30S PKI, bahkan tak jarang pula ada yang membenturkan pada ketidaksesuaian dengan pancasila Indonesia, kepada soal kepercayaan. Karena anggapan umum masyarakat Indonesia pada ideologi komunisme, menyingkirkan prinsip kepercayaan ketuhanan dan memprioritaskan materialisme sebagai utama.

Hal tersebut tentu menjadi satu hal yang tidak bisa diterima oleh bangsa Indonesia atas keberadaan komunisme dan PKI di Indonesia, sebelumnya telah membawa tragedi dikatakan sebagai dalang dari pembunuhan 7 Jendral kebanggaan bangsa Indonesia. Tragedi berdarah tersebut menjadi nyala api bangsa Indonesia menolak keras keberadaan ideologi kiri tersebut, termasuk berdampak pada manusia-manusia Indonesia tidak berani lagi berpedoman sebagai orang-orang politisi kiri. Mulai menggerusnya keberadaan politik kiri membawa ekosistem politik Indonesia bertransformasi menjadi pada politik elit dan oligarki, segala sisi ruang politik di Indonesia hingga hari ini, dari masa orde baru sampai reformasi dipenuhi dengan politik-politik dari penguasa yang berdiri atas dunia kapitalisme, sehingga yang terjadi berupa dinamika politik Indonesia hanya ada dalam ketenangan, kenyamanan dan kebahagiaan sebagian elit saja. Namun, sebagian banyak lagi, terkhusus masyarakat Indonesia terbuang jauh entah berantah. Penolakan atas keberadaan politik kiri memang muncul dari sejarah kelam bangsa Indonesia, dimata dunia politik Indonesia terjadi pengrusakan pada keberadaan lawan politik yang terlalu alim pada “rakyat”, posisi melulu pada rakyat inilah yang menjadikan politik kiri menjadi musuh berat para kaum kapitalis modal yang berkuasa.

Mengapa Menghidupkan Politik Kiri Di Indonesia

Satu yang pasti bahwa politik di Indonesia hari ini penuh dengan konspirasi, sebab banyak politisi yang menggunakan identitas dan nilai-nilai simbol untuk diperjual beli dalam menghargai kepentingan nya. Sudah wajar akan ditemukan, para politisi mendakwahi jawaban politik dengan jawaban agama, sebab apa yang akan ditanyakan soal program politik, selalu saja berakhir pada kelompok yang banyak. Mudah saja mengontrol politik di Indonesia, cukup butuh kepercayaan diri, mengendalikan kelompok mayoritas, lalu menuhankan sejarah-sejarah kemenangannya. Inilah kunci politik di Indonesia, bukan menunjukkan betapa pantas dan berkualitas seseorang untuk dipilih, bukan betapa memang ia memiliki potensi dan nilai-nilai lebih untuk dipilih, namun seberapa banyak orang menyukai nya, lalu ia lah yang dipilih bukan karena kemampuan, tapi karena sebuah rasa yang sama.

Ini tentu satu hal baik dalam negara yang menganut katanya sistem “demokrasi”, menghidupkan rakyat sentris dalam politik. Mengutamakan apa yang diinginkan rakyat adalah sesuatu hal pasti di negara Demokrasi, sebab posisi tertinggi dari sebuah kedaulatan di

Indonesia adalah ditempati oleh rakyat. Tetapi satu hal yang perlu diketahui, bahwa Demokrasi yang mengedepankan kepentingan rakyat yang lebih banyak cenderung ada hal yang menggajal dan tidak cocok. Jika asumsi pertama bahwa demokrasi hadir untuk yang paling banyak, dalam contoh nya saja ialah pemilu dan pengambil voting, maka yang menjadi esensi politik demokrasi di Indonesia adalah nilai kuantitas, dan lebih banyak persoalan kualitas di sembunyikan di pojokan.

Banyak sekali bermunculan pikiran bahwa politik yang hidup di Indonesia adalah yang sepehaman, apa yang menjadi penerjemah orang banyak dan apa yang diikuti oleh orang banyak. Politik demokrasi tentu tidak seperti ini, meskipun apa yang menjadi makna paling sederhana dari “demokrasi” adalah tentang memaknai langkah dari, oleh, dan untuk rakyat. Jika demokrasi masih dipahami dalam hal semakna tersebut, maka itu adalah demokrasi yang belum matang, karena apa memaknai nya dengan mentah dan masih tidak bisa enak dimakan. Jika demokrasi seperti itu masih awet dan membudidaya, maka hasilnya ialah dunia politik di suatu negara hanya tentang kuantitas yang mengendalikan semua, sehingga pada variabel lain akan mengalami pengabaian dan bahkan lebih buruknya lagi ialah kerusakan (Dean, 2023).

Hari ini, kita melihat politik di Indonesia hanya tentang “kesepahaman dan kesepakatan” yang diwajibkan, sehingga suasana terjadi dalam politik di Indonesia hanyalah suasana ketidakwarasan. Kenapa?, karena banyak politisi yang bersepakat tanpa menjadi oposisi karena bagian dari kelompoknya. Sehingga, muncul rasa perjuangan bukan karena memang murni untuk berjuang membangun Indonesia, melainkan berjuang untuk kepentingan diri sendiri saja. Cukup mengikuti faham yang sama, ideologi yang sama dan membanggakan sejarah atas kemenangan, adalah sebuah strategi untuk menjadi politisi yang bisa mencapai kemenangan dengan lebih mudah.

Pola politik yang hidup di Indonesia hari ini masih tetap sama, tidak memuaskan sama sekali. Selalu ada saja ketidakpuasan karena mereka dalam ruang debat politik hanya “setuju-setuju” saja. Politik bukan tentang kesepakatan sejak awal, politik memposisikan kesepakatan dalam hal yang terdesak dan akhir. Namun, politik memposisikan perdebatan intelektual dengan banyak sekali argumentasi, dari jawaban logis, empiris, positivis sampai dengan menjawab setiap tesis-tesis program yang dibuat dengan melihat sisi-sisi negatif nya. Tentu cara itu sangat diperlukan, sehingga dalam dunia politik yang hidup dalam sebuah bangsa yang besar, sangat diperlukan oposisi yang kuat, oposisi yang dikatakan bukan hanya tidak bersepakat, melainkan ia adalah oposisi pemerintah yang menyatakan secara verbal, lalu membuktikan aksi nya dalam bentuk nyata.

Indonesia, butuh manusia-manusia dengan jiwa politik ketidaksepakatan, karena dari sanalah ada rasa ingin terus belajar tanpa henti. Memperbaiki apa yang dibuat untuk sesuatu lebih baik lagi. Politik di Indonesia butuh sesuatu yang “membakar” di cuaca dingin politik penuh dengan setuju-setuju saja. Sehingga membangunkan ruang dialektika dengan berbagai harapan bahwa perubahan dilakukan bukan berdasarkan kesepakatan awal, namun ia adalah hasil dari proses panjang, dengan berbagai pertimbangan antitesa dimunculkan. Sehingga berakhir pada kesepakatan paling mungkin untuk ditetapkan di Indonesia, karena kelahiran dari apa yang telah dibicarakan di ruang diskusi, berasal dari dialektika dengan berbagai ketidaksepakatan yang di atasi.

Itulah sesuatu berlian dibutuhkan di Indonesia, untuk mengatur kondisi politik di Indonesia hari ini yang lebih banyak hanya berada pada posisi “dingin dan kaku”. Harus ada yang memulai mereformulasi kondisi politik di Indonesia dengan memunculkan perdebatan dialektika, tanpa diskriminasi, karena Indonesia tumbuh dari sejarah dan proses panjang, maka ada rasa saling menghargai untuk memberikan kontribusi membangun negara. Satu hal yang pasti ialah Indonesia benar-benar butuh oposisi untuk menghidupkan “negeri” dengan sistem demokrasi. Indonesia butuh orang-orang yang siap melakukan pemberontakan dan kemarahan menjadi-jadi sebagai oposisi ketika ada kebijakan atau keanehan yang bermunculan di bangsa Indonesia. sehingga, dengan cara itulah Indonesia bisa bangun dan bangkit menjadi bangsa yang kuat dan kokoh (Kopyciok & Silver, 2021).

Jika ditanyakan bagaimana caranya?, jawaban akan pertanyaan tersebut adalah dengan menghidupkan lagi politik kiri di Indonesia. Politik kiri dapat dimaknai dengan paradigma politik yang menjelaskan posisi mereka sebagai perjuangan untuk rakyat, perjuangan dilakukan dalam politik seperti ini bukan sekedar hanya dalam teoritik semata, namun langsung dibuktikan. Sebab jika hanya berargumentasi dengan kesempurnaan teori, tentu akan semua bisa, namun jika mengubah dari paradigma teoritik dari sebuah masyarakat maupun negara untuk sebuah kemajuan kemanusiaan secara universal, maka itulah pula dikatakan sebagai politik kiri. Politik kiri membawa rencana-rencana program tentang kepedulian pada masyarakat kelas bawah yang mengalami ketertindasan, kemudian mereka juga hadir di hadapan masyarakat untuk menghidupkan eksistensi identitas bahwa manusia sama satu sama lain, meskipun hierarki kekuasaan tampak nyata. Namun, bagi politik kiri, melawan lebih baik daripada hanya berdiam diri saja. Keberadaan politik kiri sangat atensi bagi Indonesia kedepannya, gagasan-gagasan politik kiri membawa dunia kehidupan politik lebih pada kecenderungan hidup seperti halnya manusia. Untuk berani mengklaim kata tersebut, tentu ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa politik kiri harus di hidupkan di Indonesia hari ini;

1) Memperjuangkan Nilai-Nilai Kemanusiaan

Politik kiri membangun perspektif untuk setiap orang sebagai manusia, tanpa ada sekat perbedaan melebar. Manusia, hadir sebagai makhluk berpikir yang mampu menjelaskan sesuatu hal, sekaligus mereka hidup secara bersama-sama membangun peradaban. Politik kiri menjelaskan bahwa diri mereka kembali pada esensi bahwa diri mereka adalah manusia, sehingga menghargai nilai-nilai kemanusiaan adalah hukum universal yang berlaku. Jika memakai satu pandangan dari tokoh Filsuf kelahiran abad 18, yakni Immanuel Kant (1724-1804) menjelaskan bahwa posisi nilai-nilai kemanusiaan atau bahasa modern adalah Hak asasi manusia (HAM) merupakan posisi *imperatif kategoris* (hukum yang tak bersyarat), sehingga semestinya dipraktekkan tanpa mengharuskan ada dunia lain yang memaksakan untuk melakukannya, tidak mengharapkan untung rugi karena kemanusiaan merupakan apa yang dirasakan oleh “aku” sebagai “kami” dan sebagai “mereka” adalah sama (Devito, 2022).

Politik kiri membangun perspektif tersebut dengan mengusahakan bahwa apa yang dikejar oleh makhluk sosial ini tak lain dan tak bukan adalah persoalan kemanusiaan. Sehingga, tujuan utama dari itu semua nya adalah kemanusiaan. Franz Magnis Suseno (2003) menerangkan bahwa apa yang dinyatakan sebagai kemanusiaan adalah menghargai sebagaimana manusia hidup damai dengan dirinya, kemanusiaan adalah soal bagaimana sikap sebagai individu tercermin baik kepada ruang publik, dan begitupun sebaliknya pula publik haruslah mempedulikan apa yang ada dalam setiap hak individu. Indonesia memegang prinsip kesatuan dan persatuan dalam negara yang satu, dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, sehingga yang harus diutamakan atas segala nya di negeri ini adalah kesatuan, dan menghindari perpecahan (Suseno, 2003).

Politik kiri menempatkan dirinya sebagai perjuangan atas nilai-nilai kemanusiaan. Atas rasa hormat, saling menghargai, toleransi, dan menjauhi berbagai bentuk diskriminasi dan penghancuran atas orang lain serta pelanggaran atas hak mereka. Gagasan politik kiri penting untuk hadir kembali di Indonesia karena ia adalah bagian penting dalam mewujudkan pancasila ke 5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), menjelaskan bahwa apa yang harus didahulukan adalah soal kepentingan umum dengan menghapus ego-ego kepentingan pribadi atau kelompok. Kesejahteraan adalah persoalan universal yang harus diperjuangkan, disitulah politik kiri eksis untuk mengusahakannya, dan pantas menjadi alasan politik kiri lahir kembali di Indonesia.

2) Berusaha Menghancurkan Kesenjangan Sosial

Politik kiri memang tidak akan melepaskan diri dari pemikiran tokoh besar bernama Karl Marx (1818-1883), ia menjadi salah satu tokoh pejuang dengan gelar “nabi” di abad modern dengan banyak pengikut atas gagasan pentingnya. Marx adalah manusia, namun kadang ia menjadi pahlawan tak “kebetulan” dalam sebuah perubahan revolusioner. Gagasanya soal kesenjangan sosial tentu dibangun dari rasa gedek marx kepada pemisahan strata kehidupan manusia, dimana dirinya menyaksikan bahwa manusia mengalami pemisahan antara kaum kaya yang dikenal dengan borjuis dan kaum miskin atau pekerja bernama proletariat. Kedua nya ini mengalami kesenjangan yang begitu jauh yang membuat marx marah, sehingga perbedaan atas kelas tersebut perlu untuk dilawan, bukan sekedar hanya teori-teori perubahan (Devito, 2022).

Bagi marx, sejarah manusia adalah tentang pertengkaran kelas dengan alasan pertengkaran tersebut adalah modal. Rasa kerakusan muncul dari para kaum kaya atau kapital yang selalu mengumpulkan kekayaan tanpa henti-henti memanfaatkan para kaum proletariat, sedangkan kaum proletariat hanya menjadi budak kaum kapital dengan pekerjaan keras, namun nilai upah yang diberikan sangat lah kecil. Tentu fakta seperti ini masih menjalar hingga kini di Indonesia, menyaksikan betapa jelasnya dimanfaatkan masyarakat Indonesia dengan terus-terusan bekerja dari pagi sampai malam, namun gaji mereka tidak sesuai dengan usah dilakukan. Pemikiran Marx tentang ingin melakukan perubahan ini menjadi akar dari perjuangan selanjutnya para pejuang-pejuang politik kiri melanjutkan estafet gagasan marx lebih jauh, lahirnya politik kiri tentu menjadi dasar ketertindasan masyarakat oleh kaum kapital atau pemerintah, sehingga menghidupkan kembali politik kiri adalah cara bagaimana menghancurkan berbagai kesenjangan yang terjadi di Indonesia, supaya masyarakat Indonesia hidup dalam masyarakat harmonis, tanpa memberikan penindasan karena ada sekat demarkasi kesenjangan sosial.

3) Menstabilkan Politik Di Suatu Negara Yang Cenderung Menjadi Fasis

Politik kiri hidup sebagai oposisi pemerintah yang jahat, jahat sebagai pemimpin ditunjukkan dalam indikator bahwa pemimpin di suatu negara hanya mengedepankan keinginan pribadi, membuat kebijakan hanya untuk kepentingan sepihak atau konstitusi pesanan, berlaku kasar dan keras kepada rakyat, serta hedonisme menjadi pemimpin. Posisi pemimpin seperti ini di suatu negara jawabannya dipimpin oleh pemimpin fasis atau otoriter. Masyarakat modern hari ini memahami bahwa fasisme adalah suatu yang

buruk, bahkan banyak negara bersepakat bahwa apa yang dikatakan sebagai kepemimpinan fasisme merupakan pengengkangan terhadap kepentingan publik.

Munculnya politik kiri menjadi antitesa dari lahirnya fasisme, karena apa yang telah dikatakan sebelumnya, politik kiri merevitalisasi dunia kehidupan dengan sebuah kemanusiaan atas dan tujuan kemanusiaan. Politik kiri berusaha untuk melawan berbagai kepemimpinan yang mengkhianati janji, konstitusi dan tugasnya. Politik kiri hadir sebagai bentuk cara perlawanan terhadap pemimpin yang selalu menganggap dirinya berkuasa, lalu bebas melakukan segala-galanya. Membangun atau menghidupkan kembali politik kiri adalah jalan untuk menghidupkan kembali hak-hak atas manusia sebagai individu, hak-hak manusia sebagai warga negara dan hak seluruh manusia sama. Fasisme perlu diberantas dalam alasan apapun, era hari ini, fasisme adalah kepemimpinan perlu dihapus permanen tanpa memberikan ruang kebebasan untuk mereka menanam bibit baru. Sehingga, cara yang harus dilakukan pertama kali atas menghapus fasisme tersebut adalah membangun kembali nilai-nilai kemanusiaan, menghidupkan kembali politik kiri merupakan bagian cara membangunkan nya.

4) Paradigma Kekuasaan Berkualitas

Politik kiri dalam suatu negara berusaha menunjukkan eksistensi mereka ke posisi pro rakyat, mereka akan mulai bereaksi ketika rakyat diganggu oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan hal lainnya. Posisi politik kiri menjalankan manusia tanpa pandang bulu sebagai *agen* perubahan dan perbaikan. Ketika, seorang pemimpin melakukan pengacakan dan keributan di masyarakat, tentu sebagai bagian yang pro rakyat, politik kiri akan maju paling depan untuk mempertanyakan, mendemokrasikan sekaligus membatalkan unsur apapun itu tentang soal kerugian rakyat.

Ketika hal tersebut berhasil dilakukan, politik kiri menjadi satu sistem yang hidup di suatu negara telah berhasil untuk membawa perubahan terbaik atas kemanusiaan, melawan pemerintah atas kebijakan yang tidak benar adalah cara mereka untuk melawan, baik dalam perdebatan dialektika sampai-sampai paling nyata dalam aksi demo tidak akan lepas mereka lakukan untuk sebuah kebenaran. Politik kiri sangat lah penting, itu membuat pemerintah mulai lebih sadar dimana posisi mereka, ketika penguasa membuat kebijakan lalu kemudian direspon negatif oleh rakyat, maka disitulah kesadaran muncul sebagai bentuk intropeksi. Tidak ada penguasa yang sempurna, namun selalu ada penguasa yang belajar dari kesalahan. Politik kiri berani mengambil peran sebagai bagian sistem negara atau lawan politik pemerintah untuk menyadarkan penguasa ketika mereka telah berada pada jalan yang menyimpang.

5) Mengajarkan Hidup Dengan Makna Real

Salah satu yang menarik dari politik kiri adalah mengajarkan seseorang untuk memahami realitas. Realitas dalam perspektif politik kiri lebih kepada bagaimana bereaksi pada dunia yang mereka tinggali dengan menggunakan apa yang ada dan nyata. Tentu politik kiri mengajarkan seseorang sebagai warga negara sebagai seorang yang kata Karlina Supelli sebagai sekularisasi, yakni dimana seseorang menghadapi sesuatu yang ada di dunia dengan solusi dan cara yang ada di dunia, sehingga manusia tidak mudah menyalahkan sesuatu yang sempurna (Tuhan) ketika mereka tidak berhasil melakukannya. Kegagalan setiap aksi adalah kegagalan setiap orang, bukan karena alasan takdir. Posisi takdir adalah posisi puncak dari Tuhan lah yang menghendaki semua. Politik kiri mengajarkan tentang kenyataan atau realitas untuk hidup, tidak bergantung pada takdir dan kepasrahan. Namun, yang dilakukan adalah berani untuk mengubah kondisi “tidak baik-baik saja” dengan tidak hanya berteori, tapi lakukan, lakukan, dan berani.

Politik kiri mengajarkan kenyataan harus dihadapi, dilawan dan bahkan jika solusi paling mungkin adalah hanya revolusi, maka eksekusi. Politik kiri berusaha menghidupkan apa yang berada pada ruang sidang realitas warga negara, berhadapan langsung dengan negara dan problematika setiap harinya. Tentu, respon bijak dilakukan yakni berani berubah, melangkah dengan semangat peradaban. Jika mengikuti sabda Marx bahwa yang perlu dilakukan dari keambiguan warga negara yang penuh dengan khayalan-khayalan ide filosofis dan sains tak lain dari lakukan untuk perubahan lebih baik.

Politik kiri sangat penting dibutuhkan oleh bangsa Indonesia hari ini, karena mereka-mereka akan menjadi orang yang pada posisinya melawan para kaum penindas masyarakat. Meskipun dalam sejarah Indonesia mengalami tragedi yang tidak baik-baik saja dengan salah satu bagian penganut politik kiri, namun bukan berarti bangsa Indonesia mengusir seluruh keluarga ideologi politik kiri, dan bahkan mencatat di konstitusi sebagai ideologi yang berbahaya. Politik kiri penting untuk Indonesia hari ini, seperti apa yang pernah dikatakan oleh Franz Magnis Suseno bahwa Indonesia kekurangan satu hal dalam kehidupan kebangsaan nya, ialah tentang politik kiri yang memegang nilai sila keempat dan kelima dalam pedoman kehidupan bangsa Indonesia.

Indonesia butuh politik kiri untuk mengusahakan kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan yang sebenar-benarnya merdeka tanpa ada penjajahan atas bangsa Indonesia. mengutip pandangan tokoh Politik Kiri di Indonesia yakni Tan Malaka (1879-1949) tentang

Indonesia dan kemerdekaannya, bahwa yang diperlukan Indonesia hari ini adalah kemerdekaan 100%. Menurut Tan Malaka yakni Bapak Republik Indonesia, ia menggagas konsep Merdeka 100% sebagai kemerdekaan yang sesungguhnya bagi bangsa Indonesia (Crawford, O. 2019). meskipun pada tahun 17 agustus 1945 kemerdekaan diproklamasikan, namun menurut Tan Malaka kemerdekaan pada 1945 tersebut adalah kemerdekaan dirasakan oleh kaum elit, kaum fulus dan orang-orang berkuasa saja. Sedangkan, rakyat Indonesia tidak merasakan seutuhnya kemerdekaan tersebut. Kemerdekaan 1945 adalah milik para kaum beruang dan berkuasa, sehingga Tan Malaka menginginkan kemerdekaan 100% untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam pertemuan Tan Malaka dengan soekarno, Hatta, Agus Salim pada 24 Januari 1946, ia mengungkapkan kekecewaannya kepada tokoh tersebut tentang kemerdekaan Indonesia, ia mengatakan;

“kepada kalian para sahabat, tahukah kalian kenapa aku tidak tertarik pada kemerdekaan yang kalian ciptakan. Aku merasa bahwa kemerdekaan itu tidak kalian rancang untuk kemaslahatan bersama. Kemerdekaan kalian diatur oleh segelintir manusia, tidak menciptakan revolusi besar. Hari ini aku datang kepadamu wahai sukarso sahabatku. Harus aku katakan bahwa kita Merdeka, karena Merdeka haruslah 100 persen, hari ini aku melihat bahwa kemerdekaan hanya dimiliki kaum elit, yang mendadak bahagia menjadi bourjois, suka cita menjadi amtenar, kemerdekaan hanya milik kalian, bukan milik rakyat. Kita mengalami perjalanan yang salah tentang arti Merdeka. Apabila kalian tidak segera memperbaikinya, maka sampai kapanpun bangsa ini tidak akan Merdeka hanya para pemimpinnya yang akan mengalami kemerdekaan, karena Merdeka adil dan makmur itu dirasakan. Dengarkan perlawanan ku ini, karena apabila kalian tetap bersikap seperti ini, maka ini hari terakhir aku datang sebagai seorang sahabat dan saudara. Esok, adalah hari dimana aku akan menjelma menjadi musuh kalian, karena aku tetap berjuang untuk Merdeka 100 persen”

Tan Malaka memandang bahwa kemerdekaan Indonesia sejak awal tidak didesain untuk Merdeka 100%, sehingga dirinya lah yang berjuang untuk kemerdekaan 100% tersebut terwujud, meskipun ia harus menjadi musuh teman-temannya sendiri, menjadi oposisi di pemerintahan Indonesia (soekarno-Hatta). Tan Malaka melihat bagaimana kemerdekaan 100% itulah yang benar-benar untuk rakyat Indonesia, Indonesia dikatakan Merdeka seluruh rakyat Indonesia jika mereka Merdeka 100%. Konsep kemerdekaan seperti ini menurut Tan Malaka aka bisa di rasakan oleh kalangan manapun, baik rakyat, penguasa, maupun para elit yang sibuk mengumpulkan fulus. Tentu saja, kemerdekaan seperti ini pula merupakan kemerdekaan yang

diharap-harapkan oleh seluruh dan segenap rakyat Indonesia, karena mereka sudah tidak lagi terjajah oleh bangsa lain maupun oleh bangsa sendiri.

Tan Malaka dalam ide Merdeka 100% adalah cara Indonesia menjadi negara mandiri, tidak lagi terkungkung dan terikat penuh dengan negara lain. Indonesia menjadi negara mandiri, memang tidak mudah menjadi negara mandiri, namun Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam maupun manusia. Sehingga, secara sadar betul Indonesia dibangun dengan kerja sama seluruh rakyat Indonesia, berbondong-bondong menciptakan Indonesia Merdeka 100%. Terus mencoba, belajar, tidak takut gagal, membangun Indonesia dengan rakyat Indonesia sendiri menjadi aktor hilir hingga hulu. Kemerdekaan 100% dalam perspektif Tan Malaka membawa Indonesia ke dalam kemakmuran, perdamaian dan kesejahteraan (Malaka, T. 1987).

Gagasan Tan Malaka inilah menjadi satu dari sekian banyak referensi dari pentingnya Kembali menghidupkan politik kiri di Indonesia. Karena, banyak tokoh-tokoh kiri di Indonesia menempatkan diri kepada perjuangan rakyat, bukan perjuangan kekuasaan. Politik kiri mengidam-idamkan kondisi kemajuan dari rakyat dan menyingkirkan berbagai bentuk kekerasan yang hadir membikin penderitaan. Ketika politik kiri hadir di Indonesia, tumbuh dengan ideologi Pembangunan rakyat dengan tetap preferensi pedoman Pancasila, maka apa yang dinyatakan sebagai demokrasi dan Republik, kemudian apa yang dikatakan sebagai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan lagi sekedar konsep utopis, namun bisa saja terwujud nyata Ketika benar-benar dipraktekkan dengan baik (Suseno, 2003).

4. KESIMPULAN

Politik di Indonesia saat ini lebih didominasi oleh konformitas dan kepentingan kelompok mayoritas, dimana kekuasaan sering diperoleh bukan karena kompetensi, tetapi karena popularitas dan kesepahaman. Demokrasi di Indonesia cenderung berfokus pada kuantitas dukungan, tanpa memperhatikan kualitas substantif dari kandidat atau kebijakan yang diusung. Hal ini menyebabkan terjadinya stagnasi politik, dengan diskusi dan dialektika yang terbatas pada persetujuan bersama, tanpa adanya oposisi yang kuat atau kritik yang membangun. Akibatnya, kepentingan rakyat seringkali terpinggirkan demi kepentingan kelompok atau individu tertentu yang menguasai politik melalui popularitas dan kesepakatan awal. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk menghidupkan kembali politik kiri di Indonesia. Politik kiri berperan sebagai kekuatan oposisi yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan fokus pada kesejahteraan rakyat, politik kiri bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan melawan fasisme atau otoritarianisme

yang dapat mengancam kebebasan dan hak-hak publik. Dalam konteks Indonesia, politik kiri bisa menjadi kunci untuk menciptakan perubahan politik yang lebih dinamis, adil, dan humanis, di mana setiap kebijakan dihasilkan melalui proses dialektika yang terbuka dan transparan.

DAFTAR REFERENSI

- Agustín, Ó. G. (2020). Why left-wing populism?. In *Left-Wing Populism* (pp. 1-12). Emerald Publishing Limited.
- Aji, W. T. (2024). *Dasar-Dasar Etika Politik Franz Magnis Suseno*. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, 3(4), 174-192.
- Aji, W. T. (2024). *Etika politik Franz Magnis Suseno*. Ypad Penerbit.
- Aji, W. T. (2024). Politik lokal: Tinjauan systematic literature review. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 415-429.
- Aji, W. T. A. (2024). Tan Malaka: The concept of 100% independence in perfecting the independence of the Republic of Indonesia. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 7(2), 45-61.
- BBC. (2010, October). *Matinya politik kiri Indonesia*. https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2010/10/101001_kiri5. Akses pada 2 Januari 2025.
- Costello, T. H., Bowes, S. M., Stevens, S. T., Waldman, I. D., Tasimi, A., & Lilienfeld, S. O. (2022). Clarifying the structure and nature of left-wing authoritarianism. *Journal of Personality and Social Psychology*, 122(1), 135.
- Crawford, O. (2019). *The political thought of Tan Malaka* (Doctoral dissertation).
- Dean, J. (2023). Left politics and popular culture in Britain: From left-wing populism to 'popular leftism'. *Politics*, 43(1), 3-17.
- Devito, M., Aziz, R. A., & AF, M. R. (2022). Konsep keadilan dan hukum menurut Karl Marx. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(01).
- Indoproggress. (2015, September). *Strategi alternatif politik elektoral (kiri)*. <https://indoproggress.com/2015/09/strategi-alternatif-politik-elektoral-kiri/>. Akses pada 2 Januari 2025.
- Indoproggress. (2019, January). *Populisme kiri sebagai langkah politik alternatif di Indonesia*. <https://indoproggress.com/2019/01/populisme-kiri-sebagai-langkah-politik-alternatif-di-indonesia/>. Akses pada 2 Januari 2025.
- Kopcyiok, S., & Silver, H. (2021). Left-wing xenophobia in Europe. *Frontiers in Sociology*, 6, 666717.
- Mahendra, R. E. M. (2022). Menimbang pemikiran Semaoen dan Tan Malaka. *Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 4(1), 29-36.

- Malaka, T. (1987). *Naar de 'Republik Indonesia' Menuju Republik Indonesia*. Yayasan Massa.
- Mojok.co. (2025, January 2). *Kenapa kita butuh membaca buku kiri?* <https://mojok.co/terminal/kenapa-kita-butuh-membaca-buku-kiri/>. Akses pada 2 Januari 2025.
- MSN. (2025, January 2). *Kemenangan partai kiri dan dampaknya bagi Indonesia*. <https://www.msn.com/id-id/berita/other/kemenangan-partai-kiri-dan-dampaknya-bagi-indonesia/ar-BB1pNxqU>. Akses pada 2 Januari 2025.
- News.detik. (2025, January 2). *Memetik refleksi atas politik "kiri"*. <https://news.detik.com/kolom/d-6560431/memetik-refleksi-atas-politik-kiri>. Akses pada 2 Januari 2025.
- Parlan, H. P., & Bahar, H. (2024). Filsafat materialisme Karl Marx (Epistemologi dialectical and historical materialism). *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies*, 4(2), 415-428.
- Ramadhani, P. S., Yani, D. F., & Lubis, D. M. (2023). Kekuasaan dan politik dalam perilaku organisasi. *Journal of Resources and Reserves (JRR)*, 1(01), 1-9.
- Setiawan, A., Subaryana, S., & Lestari, S. N. (2023). Evolusi ideologi: Pengaruh Tan Malaka terhadap politik Indonesia, 1921-1949. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 4(3), 138-144.
- Sirait, K., Pardosi, F. P., Manullang, V., & Sirait, R. (2023). Sejarah pemikiran politik Tan Malaka mengenai kemerdekaan dan konsep negara Indonesia. *Journal Transformation of Mandalika*, 4(6), 329-337.
- Suseno, F.-M. (2003). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Gramedia Pustaka Utama.
- Syarofuzzaman, A. (2024). Dinamika stabilitas politik di Indonesia ditinjau dari pemikiran politik kekuasaan Nicholas Machiavelli. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 16(1), 22-29.